

ABSTRAK
PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN PERSATUAN BULAT
TERHADAP PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN
(Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Mengenai harta persatuan bulat, dalam Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta persatuan bulat diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dalam KUHPerdara Pasal 128 yang menyebutkan bahwa "setelah bubar nya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh".

Problematis penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Pembagian Harta Perkawinan Persatuan Bulat Terhadap Perkawinan Beda Kewarganegaraan 2) Apakah Pembagian Harta Perkawinan Persatuan Bulat Terhadap Perkawinan Beda Kewarganegaraan menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2309/Pdt.G/2015/PA JS. pada tanggal 24 Oktober 2015 telah sesuai dengan keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pembagian harta kekayaan perkawinan akibat perceraian dalam perkawinan campuran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2309/Pdt.G/2015/PA JS. pada tanggal 24 Oktober 2015 dilakukan berdasarkan KUHPerdara yaitu langsung dibagi 2 (dua). Pelaksanaan pembagian harta kekayaan akibat perceraian dalam perkawinan campuran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah apabila ada aset harta kekayaan perkawinan yang berada di luar negeri, karena pada dasarnya apabila gugatan diajukan di Indonesia, maka semua dibagi di Indonesia. Dalam hal ini tergantung Pengadilan Asing mau atau tidak melakukan putusan Pengadilan Indonesia. Dalam perkawinan campuran sebaiknya dibuat perjanjian kawin agar kepastian hukum terhadap harta kekayaan masing-masing pihak lebih terjamin.

Kata Kunci : *Harta Perkawinan, Harta Persatuan Bulat, Beda Kewarganegaraan.*

ABSTRACT
DIVISION OF MARITAL PROPERTY UNITY ROUND OF MARRIAGE
DIFFERENT CITIZENSHIP
(Studies in South Jakarta District Court)

About treasure unity round, in Article 37 of Law 1 of 1974 concerning marriage specify that if the marriage broke up because of divorce, treasure unity rounded governed by the law of each. What is meant by legal respectively mean religious law, customary law, and other laws. In Article 128 of the Civil Code which states that "after the dissolution of the union, then the property of unity split between husband and wife or between their heirs respectively, by not considering the question of which of the stuff it takes".

The problematic of this research are: 1) How treasure division Unity Round Against Marriage Marriage Beda Citizenship 2) Is the treasure division Unity Round Against Marriage Marriage Beda Citizenship by the South Jakarta District Court Decision No. 2309 / Pdt.G / 2015 / PA JS. on October 24, 2015 in accordance with justice.

The method used in this research is the empirical juridical approach that comes from the collection of the data obtained from the primary data and secondary data, and then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used are field studies (interviews). Data were analyzed using qualitative data analysis.

The findings show that the division of assets of the marriage of divorce in mixed marriages in the South Jakarta District Court No. 2309 / Pdt.G / 2015 / PA JS. on October 24, 2015 conducted by the Civil Code that is directly divided by 2 (two). The distribution of wealth as a result of divorce in mixed marriages in the South Jakarta District Court is that if there are marital assets treasures are abroad, because basically if a lawsuit filed in Indonesia, then all shared in Indonesia. In this case depends on the Court Foreigners do not want or Indonesian Court decision. In mixed marriages should be made legal certainty agreements in order to marry the wealth of each party is guaranteed.

Keywords : *Marriage treasure, treasure Unity Round, Different Citizenship.*